

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sebuah sistem di Indonesia diwujudkan dengan sistem otonomi daerah dan desentralisasi yang digunakan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, memberikan dampak atas sistem ekonomi, kemasyarakatan, sosial, dan politik dalam kegiatan pemerintah daerah (Putri & Fadilah, 2021). Menurut Mardiasmo (2018) desentralisasi dapat memberikan manfaat untuk mendorong peningkatan partisipasi prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Pemerintah daerah berperan sebagai pengelola sumber daya yang dimilikinya, dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) termasuk pengelolaan keuangan daerah (Azlina, 2019).

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pembinaan anggaran (Maulidiah, 2017). Menurut Putri & Fadilah (2021) pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan baik dapat mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana pengelolaan keuangan daerah mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel. Pernyataan tersebut didukung oleh Defitri (2018) bahwa keuangan daerah harus dilakukan dengan

tertib, dan taat pada regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, dan kepentingan masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pada Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat memberikan manfaat untuk dasar acuan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait operasional, mengavaluasi kondisi keuangan, mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi yang dilaporkan, serta memfasilitas penilaian kepatuhan terhadap perundang-undangan (Erniati, 2019). Menurut Leunupun, dkk (2022) jika laporan keuangan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan, hal itu akan mendorong kemajuan pembangunan dan menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Melalui penyajian informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat, maka dapat menciptakan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Jati, 2019).

Tingkat kualitas kinerja suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, dapat diketahui dari proses audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (Rahmasari, 2020). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari BPK yang berupa opini. Pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Ponorogo menunjukkan kinerja

pemerintah daerah yang bagus. Pada laporan BPK Provinsi Jawa Timur tahun 2024, menyatakan Kabupaten Ponorogo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2015 sampai 2023 (BPK, 2023). Opini WTP tersebut, menegaskan bahwa Kabupaten Ponorogo mampu mengelola keuangan daerah dengan konsisten, dan memenuhi standar karakteristik laporan keuangan yang berkualitas untuk mencerminkan kinerja pemerintah yang baik.

Adapun ditemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh BPK yaitu Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dan Honorarium UKPBJ tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP), serta penatausahaan aset tetap belum memadai. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal di beberapa area.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, telah diteliti oleh berbagai pihak dengan hasil yang berbeda-beda dan menggunakan variabel yang berbeda pula. Menurut Nugroho & Setyowati (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasional, sistem informasi akuntansi, dan peran audit

internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menunjukkan hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian oleh Muliani, dkk (2023) menggunakan variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lestari & Hastuti (2020) yang menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian Nurhayati, dkk (2019) menggunakan variabel penerapan akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal untuk menguji pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan akan mengujinya kembali. Variabel pada penelitian ini menggunakan variabel sistem informasi akuntansi dari Nugroho & Setyowati (2019), variabel sistem pengendalian internal dari Muliani, dkk (2023), variabel peran audit internal dari Lestari & Hastuti (2020), variabel penerapan akuntansi berbasis akrual dari Nurhayati, dkk (2019). Dengan demikian, variabel yang signifikan dalam penelitian dianggap dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem informasi akuntansi. Selaku pengelola sumber daya publik, pemerintah daerah harus mampu untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi akuntansi yang andal. Menurut Atharrizka, dkk (2021) penggunaan sistem informasi akuntansi yang andal oleh pemerintah daerah berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi baik manual maupun perkomputerisasi sangat penting dalam proses mengelola tugas-tugas entitas serta mendukung kelancaran operasional dan memastikan ketepatan dalam penyampaian informasi keuangan (Tawaqal & Suparno, 2017). Penggunaan sistem informasi pada pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi secara tepat, jelas, dan terstruktur (Wulandari & Yulianti, 2023).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian internal. Pemberian hak otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyelewengan penting untuk menyertai pemberian wewenang dengan pengendalian yang kuat. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berperan dalam memberikan kelayakan yang memadai untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi,

khususnya dalam memastikan keandalan laporan keuangan (Wulandari & Octaviani, 2020).

Penerapan SPIP yang kuat, mempunyai keuntungan sebagai dasar acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, menunjukkan keakuratan laporan keuangan pemerintah daerah, memastikan keandalan informasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Jannah & Ishak, 2023). Sistem pengendalian internal menjadi elemen penting dalam pemerintahan yang digunakan untuk mengawasi aktivitas entitas guna memastikan terlaksananya tata kelola yang baik yaitu secara efektif dan efisien.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu peran audit internal. Penggunaan sistem pengendalian internal pastinya tidak terlepas dari proses pelaksanaan audit internal. Menurut Sasmita, dkk (2020) pelaksanaan audit internal pada instansi pemerintah sebagai bentuk pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pada seluruh instansi pemerintah daerah termasuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) akan mendapatkan pendampingan terkait pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. APIP sendiri bertugas sebagai auditor internal pemerintah. Peran audit internal diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan andal (Fibriyani, dkk, 2021).

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan akuntansi berbasis akrual.

Adapun untuk mencapai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan dan andal, diperlukan penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan standar yang berlaku umum (Jati, 2019). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1, menyatakan penerapan akuntansi berbasis akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya peristiwa tanpa memperhatikan kas atau setara kas yang diterima atau dibayar. Laporan keuangan daerah yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dirancang untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, termasuk pengguna dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (Mahardini & Miranti, 2018).

Berdasarkan fenomena adanya permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah dan analisis hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan mengembangkan hasil dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal Dan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo?
5. Apakah Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal dan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

3. Untuk mengetahui pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal dan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Universitas

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai acuan referensi bagi mahasiswa terutama untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penghubung antara pengetahuan, wawasan, dan berbagai ilmu yang telah dipelajari dengan yang terjadi di lapangan.

4. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur atau referensi dalam sebuah penelitian yang akan datang dengan menjadikan tema penelitian yang sama dan dapat menjadi gambaran untuk penelitian kedepannya.

